

Judul : Jangan politisasi sektor transportasi
Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Jangan Politisasi Sektor Transportasi

JAKARTA—Pemerintah diminta tidak mempolitisasi sektor transportasi. Terutama penerbangan yang merupakan jasa angkutan berisiko sangat tinggi (*high risk*). Pasalnya, membahayakan keselamatan nyawa publik.

Bambang Haryo Soekartono, anggota DPR RI periode 2014–2019 mengatakan, politisasi transportasi oleh pemerintah selama ini, antara lain terlihat dari pemberhentian Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Ashkara beberapa waktu lalu.

"Garuda sebenarnya sudah dikelola dengan baik oleh Ari Ashkara sebab dia berhasil membuat Garuda untung Rp1,7 triliun per September 2019, setelah sebelumnya merugi hampir Rp5 triliun pada 2017–2018. Padahal, kondisi penerbangan pada 2019 cukup berat karena terjadi penurunan *demand*," ujarnya kepada INDOPOS di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (2/3).

Dia menilai, Ari telah mengelola perusahaan transportasi secara profesional dan berhasil mencatatkan keuntungan. "Manajemen Garuda saat dia pimpin sangat paham bahwa transportasi tidak boleh merugi untuk mendapatkan keuntungan secara wajar agar dapat menutupi biaya keselamatan dan kenyamanan," ujarnya.

Menurut Bambang, kondisi pada 2019 setelah September terjadi penurunan standarisasi pelayanan transportasi udara akibat politisasi transportasi oleh pemerintah yang mendesak tarif diturunkan. Akibatnya, terjadi lagi pemberian perang tarif oleh maskapai nasional dan pemberian insentif ke sektor penerbangan yang terlalu dipaksakan.



BERISIKO TINGGI - Pesawat Garuda Indonesia di salah satu bandara.

"Padahal, penerbangan merupakan transportasi dengan mayoritas pengguna kalangan menengah ke atas," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah sangat kurang memperhatikan transportasi untuk kalangan menengah bawah yaitu angkutan laut dan angkutan darat bus dan truk, yang berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total angkutan logistik dan penumpang di Indonesia.

"Sektor maritim juga merupakan jargon pemerintahan Jokowi, tetapi kenapa justru sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah?" ungkapnya.

Pengguna jasa penerbangan dikhawatirkan selalu dibayangi ancaman keselamatan dan buruknya pelayanan apabila pemerintah membiarkan perang tarif yang mengakibatkan maskapai mengalami kerugian besar. Apalagi kebutuhan operasional semakin tinggi, seperti biaya suku cadang akibat kenaikan nilai dolar AS hingga 60 persen sejak 2012 dan biaya lainnya.

Bambang Haryo mengatakan, kondisi dunia penerbangan kesu-

“
Sektor maritim juga merupakan jargon pemerintahan Jokowi, tetapi kenapa justru sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah?
”

Bambang Haryo Soekartono
Anggota DPR RI periode 2014–2019

litan akibat kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, pesawat sering *holding* atau berputar-putar di udara sebelum mendarat dan antri sebelum terbang sehingga jadwal penerbangan menjadi lebih lama 30 persen–50 persen.

Akibatnya, konsumsi avtur meningkat dan biaya operasional maskapai meningkat. Selain itu, buruknya pengaturan jadwal *take-off* dan *landing* serta kurangnya infrastruktur pen-

dukung. Faktor lain, tidak ada terminal LCC (*low cost carrier*) sehingga pesawat LCC harus menggunakan fasilitas terminal *full service* dengan biaya lebih mahal, serta lonjakan biaya perawatan pesawat (MRO).

"Persoalan klasik adalah mahal biaya birokrasi sehingga menyulitkan maskapai. Semua persoalan itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi, keuntungan berkurang, sehingga beberapa maskapai harus melanggar standar pelayanan minimum yang diwajibkan mendorong manipulasi standarisasi keselamatan," kata Bambang yang merupakan Investigator Senior KNKT.

"Saya membuktikan sendiri seperti di beberapa maskapai tidak memenuhi standar, seperti kabin air sickness bag, instruksi keselamatan rusak, tidak ada majalah atau surat kabar, dan bahkan tidak ada media hiburan di pesawat *full service*," ungkapnya.

Dia menambahkan, apabila kondisi itu dibiarkan bisa membahayakan nyawa publik dan menggerus standarisasi keselamatan dan kenyamanan penumpang sesuai PM No 185 Tahun 2015 dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

"Apakah pemerintah akan membiarkan maskapai mengalami kerugian dalam melayani transportasi masyarakat? Padahal, penerbangan adalah transportasi yang *high risk*," ujar ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur itu.

Dia mempertanyakan fungsi

pemerintah sebagai regulator, khususnya Kementerian Perhubungan. Dia mengingatkan kembali agar Kemenhub harus mampu mengendalikan maskapai agar tidak terjebak perang tarif sehingga mengancam keselamatan nyawa publik.

"Apalagi pengguna pesawat umumnya pemegang kunci ekonomi, baik pebisnis maupun birokrat. Apabila terjadi kecelakaan karena keselamatan diabaikan, ekonomi bisa terganggu karena kita kehilangan pemegang–pemegang kunci ekonomi itu," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, Ari Ashkara dapat diproses secara hukum karena melakukan penyelundupan. Selain itu, ia dinilai menyalahgunakan jabatannya sebagai Direktur Garuda Indonesia.

"Kalau persoalan inilah artinya ini sudah berkaitan dengan ranah sanksi administrasi maupun itu juga sudah masuk ranah hukum karena itu bisa dikategorikan penyelundupan. Kemudian ya tentu dia sebagai pejabat menyalahgunakan jabatannya membawa itu. Saya kira itu diproses secara hukum (pidana)," kata Syarif saat dihubungi, kemarin.

Mengenai soal transportasi penerbangan, sambung politikus Partai Nasdem itu, pihaknya akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengevaluasi regulasi penerbangan.

"Ya, kita mungkin dari sisi regulasinya itu sisi regulasinya karena Komisi V berkaitan dengan regulasi. Kita tidak hanya Garuda kita evaluasi secara keseluruhan terkait pengawasan di bandara itu," tutupnya. (aen)